

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Aidul Fitriadi Azhari. 2014. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. Bantul: Genta Publishing.
- Agustina Setiawan. 2022. *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafinso.
- Arnol Ferddinand dkk. 2023. *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa*. Bandung: Alumni.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tata Kelola Pemerintahan*. 2020. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-HillCo.
- _____. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- Dahlan Thaib. 2002. *"Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945"*. Yogyakarta: Liberty.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Didik G. Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Djohan Djohermansyah. 1990. *Problematisa Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksa.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu)*. Malang: UMM Press.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- _____. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hans Kelsen. 2016. *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- _____. 1973. *General Theory of Law and State (Translated by: Andres Wedberg)*. New York: Russel & Russel.
- HAW. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli. Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Herman Abdullah. 2009. *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*. Jakarta: Rmbooks.
- Hotma P. Sibuea. 2002. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2010. *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum*. Bandung: Nuansa.
- Inu Kencana Syafiie. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Isharyanto & Dila Eka Juli Prasetya. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa (Prespektif. Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.

- Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Johny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lukman Santoso Az. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mansyur Achmad. 2018. *Manajemen data Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2000. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mashuri Maschab. 2013. *Politik Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN UI dan CV. Sinar Bakti.
- Moh. Fadli dkk. 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Village Governance)*. Ctk. Kedua. Malang: UB Press.
- Moch Musoffa Ihsan. 2015. *Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal. dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mhd. Shiddiq Tgk. Armia. 2003. *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhamad Mu'iz Raharjo. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- M. Silahuddin. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal. dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*. Malang: Setara Press.

- _____. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon dkk. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pratikno. 2000. *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Lpera.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahman Mulyawan. 2015. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Rahyunir Rauf. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantu)*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Ramlan & Eka N.A.M. Sihombing. 2021. "*Hukum Pemerintahan Desa*". Medan: CV Enam Media.
- Riduan Syahrani. 1993. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*. : Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Rudy. 2022. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Sarjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sirajuddin dan Zulkarnain. 2006. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik. Menuju Peradilan Yang Bersih dan Beribawa*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." yang terbit di *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2. Nomor 3 (Agustus 2019). halaman 541-557. Sumber ini juga dapat diakses melalui link <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Sri Kusriyah. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonom Daerah Dalam Prespektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Sri Soemantri. 2006. *Sistem dan Prosedur Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Sumber Saparin. 2009. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhartono. 2000. *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong. Cetakan I*. Yogyakarta: Laperapustaka Utama.
- Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru. Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- _____. 2005. *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sutoro Eko dan Abdul Rozali. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Taliziduhu Ndraha. 1997. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1999. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____. 1997. *Otonomi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

- Agustin Widjiastuti. "Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN". *Jurnal Perspektif*. 22.2 (2017). 96–110 perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/614>.

- Aprilia Lestari dan Herwin Sagita Bela. Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 5 No. 1 Januari 2020*.
- Budi Mulyadi. "Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa di Kabupaten Balungan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Vol. 2. No. 1. 2015.
- Debora Sanur. Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Politica Vol. 14 No. 1 Mei 2023*.
- Fikto Chrisfalsa Lifu dkk. Pelaksanaan Pemekaran Desa Oenitas. Kecamatan Rote Barat. Kabupaten Rote Ndao Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Petitum Law Journal Volume 1 Nomor 2. Mei 2024*.
- Kartasasmita. Paradigma Pembangunan di Indonesia. dikutip dalam Titus Bernadus Tului. "Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu." *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol.7 No.3. 2019.
- Lendeng Syahrani. Peran Kepala Desa Induk Dalam Proses Pembentukan Desa Persiapan (Studi Terhadap PP 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 47 Tahun 2015).
- <https://media.neliti.com/media/publications/209578-peran-kepala-desa-induk-dalam-proses-pem.pdf>. diakses pada 29 April 2025.
- Mardeli Iis. Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Atma Jaya*. 2015.
- Merilin L. I. Thomas. Kajian Yuridis Pembentukan Dan Pemekaran Desa Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. IV/No. 8/Ags/2016.
- M. Zaini Harfi. Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 30/12/2016.
- Qurrota A'yuni dan Hari Prasetyo. Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum. Humaniora dan Politik (JIHHP)* Vol. 4. No. 5. Juli. 2024.
- Raden H. Santika, Budi Santoso dan Hadi Mahmud. "Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerintahan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara". *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. April 2018.

Richard Timotius.” Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018*.

Ropiko Duri dan Mutia Rahmah. “Evaluasi Pemekaran Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. 2020.

Sakinah Nadir. “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”. *Jurnal Politik Profetik*. Vol 1. No 1. 2013.

Sarif. “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019*.

Wairocana. I. 2006. Good Governmance Dalam Aturan hukum atau Kebijaksanaan Publik. Denpasar. Bali. *Jurnal Kerta Partika Fakultas Hukum Universitas Udayana (Vol. 31)*. hlm. 53.

RUJUKAN INTERNET

https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf. diakses pada 29 april 2025.

<https://sumselupdate.com/belum-layak-26-desa-persiapan-di-pali-dikembalikan-ke-des-induk/>. diakses pada tanggal 19 Januari 2025. pukul 17.00 WIB.

<http://hukum.kompasiana.com/keadilan-dari-dimensi-sistem-hukum>. diakses pada tanggal 17 Januari 2025 Pukul 19.46 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.